



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 623245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.253.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/102 m2 di GOWA, WARISAN
Rp. 1.026.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1175 m2/1175 m2 di GOWA, HASIL
SENDIRI Rp. 95.950.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di GOWA, HASIL
SENDIRI Rp. 131.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 471.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX PICK UP Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
54.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
4. MOBIL, NISSAN MAGNITE TURBO Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.784.000.000

III. HUTANG Rp. 501.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.282.300.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.